



Reformulasi Kebijakan Sektoral Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Globalisasi

Editor:
Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
dan PT Balai Pustaka (Persero)


Balai Pustaka

REFORMULASI KEBIJAKAN SEKTORAL EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI

EDITOR:

Prof. Dr. I WAYAN RUSASTRA, APU



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
dan PT Balai Pustaka (Persero)



REFORMULASI KEBIJAKAN SEKTORAL EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI

Penyunting Ahli: Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU

Penyunting: Tim Balai Pustaka

Penata Letak: Tim Balai Pustaka

Perancang Sampul: Aly Ibnu Husein

Cetakan Kesatu, 2016

@Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan oleh

Penerbitan dan Percetakan

PT Balai Pustaka (Persero)

Jalan Bunga No. 8-8A

Matraman, Jakarta Timur 13140

Tel. (021) 8583369. Faks. 8583369

Website: <http://www.balaipustaka.co.id>

374

- a
r
- Juli Panglima Saragih, dkk
Reformulasi Kebijakan Sektoral Ekonomi Indonesia Dalam
Perspektif Globalisasi/Juli Panglima Saragih, dkk. – cet. ke- 1 –
Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
xxiv 350 hlm.; 14,8 × 21 cm. – (Seri BP No. 6656)
1. Reformulasi Kebijakan Sektoral Ekonomi Indonesia Dalam
Perspektif Globalisasi
EAN 978-602-260-102-9

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Buku dengan judul “Reformulasi Kebijakan Sektoral Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Globalisasi” terbit pada saat yang tepat dan kontekstual dengan permasalahan yang dihadapi negara dan industri nasional saat ini. Kontekstual terkait dengan upaya membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional, sehingga dibutuhkan adaptasi dan reorientasi kebijakan liberalisasi agar tetap sejalan dengan peningkatan kinerja sektor strategis utama dan sektor pendukungnya. Kebijakan liberalisasi perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan dan tingkat daya saing industri, baik untuk tujuan substitusi impor maupun promosi ekspor. Dampak liberalisasi perlu dieliminasi semaksimal mungkin dan jangan sampai terjadi kasus deindustrialisasi dari pengembangan komoditas dan produk nasional. Pada setiap kerja sama perdagangan harus dapat dipetik manfaat dan dampak yang positif bagi pengembangan industri di dalam negeri.

Bahasan dalam buku ini mencakup dua dimensi utama, yaitu: (a) Kebijakan sektor strategis utama ekonomi nasional; dan (b) Kebijakan sektor strategis pendukung ekonomi nasional. Pada dimensi *pertama* bahasan pokoknya mencakup lima sektor riil pembangunan ekonomi nasional yaitu pengelolaan migas, pemasaran pariwisata Indonesia, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan koperasi menghadapi globalisasi, dan divestasi PMA dalam industri perbenihan hortikultura. Kelima bahasan pokok ini mewakili kompleksitas permasalahan dan isu kebijakan perekonomian nasional dengan cakupan aspek reorientasi konsepsi dan paradigma pengelolaan, peran *branding Wonderful Indonesia*, kendala pemasaran UMKM,

reorientasi arah dan implementasi koperasi, serta pro-kontra divestasi PMA pada industri perbenihan hortikultura.

Pada dimensi *kedua* bahasan pokoknya mencakup lima sektor strategis pendukung ekonomi nasional, yaitu kebijakan sektor keuangan dan perbankan, penyediaan energi listrik, penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN, peningkatan peran ekonomi digital, dan kebijakan liberalisasi perdagangan. Kelima aspek bahasan ini merefleksikan urgensi kebijakan strategis pendukung sebagai katalisator dan dalam memberikan fasilitasi untuk keberhasilan pengembangan sektor ekonomi riil di dalam negeri. Aspek yang dikemukakan meliputi urgensi regulasi keuangan dan perbankan dan paket kebijakan ekonomi, ketersediaan dan akses energi listrik mendukung investasi, harmonisasi optimalisasi aset dan PMN pada BUMN, peran strategis ekonomi digital dalam mendukung pembangunan inklusif, dan pentingnya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ratifikasi dan implementasi liberalisasi perdagangan.

Saya menilai struktur dan format buku serta karya tulis pendukungnya memiliki sekuensi dan konektivitas yang baik dalam mendukung tema pokok terkait reformasi kebijakan sektor strategis (utama dan pendukung) ekonomi nasional dalam perspektif globalisasi. Justifikasi dan urgensi tema telah dirumuskan dengan baik dalam Prolog, dan temuan pokok dan implikasinya juga telah dirumuskan dengan seksama dalam Epilog dari buku ini. Melalui reorientasi dan adaptasi kebijakan pendukung diharapkan dapat memberikan fasilitasi dan penguatan pengembangan dan kinerja sektor strategis utama ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada para peneliti yang dengan cermat dan inovatif telah menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam

meningkatkan pemahaman dan perumusan strategi dan kebijakan untuk pemantapan kinerja dan keberlanjutan ekonomi nasional. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya dalam merancang tema, struktur dan format buku, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

Jakarta, September 2016

Kepala Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Prolog

Dalam konteks liberalisasi perdagangan yang diindikasikan oleh dibangunnya kerja sama perdagangan bilateral, kawasan perdagangan, serta perdagangan bebas regional dan global perlu dilakukan penguatan dan bahkan reformasi kebijakan pembangunan ekonomi sektoral. Penguatan dan reformasi kebijakan dapat mencakup sektor strategis utama dan sektor strategis pendukung ekonomi nasional. Sektor strategis utama yang dipertimbangkan dalam buku ini adalah sektor migas, sektor pariwisata, sektor UMKM, koperasi, dan industri benih hortikultura. Sebagai komplementasinya, dilakukan penguatan dan reformasi sektor strategis pendukung yang memegang peran penting sebagai fasilitasi dan pendorong sektor riil. Dalam konteks ini meliputi sektor keuangan dan perbankan, penyediaan dan akses listrik, pengelolaan aset dan penyertaan modal negara, ekonomi digital, dan pelaksanaan liberalisasi perdagangan. Penguatan dan reformulasi kebijakan dapat mencakup aspek paradigma dan strategi, dimensi regulasi, tata kelola, penyertaan modal negara, divestasi PMA, dan pengembangan pemasaran serta perdagangan.

Terkait dengan sektor strategis utama, beberapa isu kebijakan penting pengelolaan migas di antaranya adalah: (a) peran sentral migas dalam memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi nasional; (b) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian subsidi BBM dan LPG dalam anggaran negara; (c) kebijakan investasi asing di sektor migas, dengan tetap terus mendorong peran investasi swasta nasional; (d) politik pengelolaan migas dengan sasaran ketahanan energi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak; dan (e) perspektif kebijakan ke depan terkait dengan pengembangan energi baru

terbarukan dalam mendukung kedaulatan dan kemandirian energi nasional. Dalam pengembangan pariwisata nasional, sebagai salah satu sektor ekonomi unggulan, dengan mengedepankan *branding Wonderful Indonesia*, perlu diperhatikan harmonisasi promosi dan ekspektasi wisatawan. Indonesia memiliki kekuatan wisata alam dan budaya yang beragam, namun masih dihadapkan pada kelemahan yang mencakup kebersihan, keselamatan dan keamanan, keberlanjutan lingkungan hidup, dan infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata. Keberhasilan pemasaran pariwisata Indonesia melalui peluncuran *brand Wonderful Indonesia* telah berhasil meningkatkan *brand value*, *country image*, dan menaikkan *trust*, namun tetap harus dikomplemen dengan kesiapan pihak terkait di dalam negeri untuk dapat mengatasi kelemahan dan permasalahan domestik pariwisata nasional.

Sektor strategis utama berikutnya adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penguatan aspek pemasarannya, yang menjadi salah satu titik lemah pengembangan di lapangan. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di antaranya adalah akses sumber daya produktif, kualitas SDM yang rendah, efisiensi dan produktivitas rendah, sehingga memiliki daya saing yang relatif terbatas. Pemerintah menyadari kelemahan tersebut, dengan diterapkannya sejumlah kebijakan dan program seperti pelatihan, kredit program bersubsidi, dan pengembangan akses pemasaran yang merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh UMKM. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi perlu dilakukan reorientasi pengembangan koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi inklusif di tingkat akar rumput. Beberapa isu kebijakan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah: (a) dalam konteks liberalisasi ekonomi, apakah pengelolaan koperasi masih mengedepankan azas

kebersamaan dan kekeluargaan, dari-oleh-dan untuk anggota; (b) perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan kinerja positif, namun tetap membutuhkan pendampingan yang semakin intensif agar prinsip-prinsip koperasi dan profesionalisme pengelolaannya semakin baik; (c) permasalahan pengembangan koperasi mencakup aspek implementasi regulasi, kelembagaan, dan keterbatasan kegiatan sektor riil; (d) tingkat ketergantungan koperasi yang relatif tinggi, serta kontribusinya yang relatif masih rendah terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, ekonomi daerah, dan ekonomi nasional; dan (e) fenomena ketertinggalan ekonomi koperasi Indonesia dibandingkan dengan eksistensi koperasi di negara maju yang notabene menganut sistem ekonomi liberal dan kapitalistik.

Industri perbenihan hortikultura memegang peran strategis dalam pengembangan ekonomi sektoral yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi, untuk pengembangan ekonomi domestik dan promosi ekspor. Isu kebijakan terkait dengan pengembangan industri perbenihan hortikultura di Indonesia, di antaranya adalah: (a) divestasi PMA kaitannya dengan upaya pencapaian kemandirian dan kedaulatan benih hortikultura; (b) peran benih yang tidak tergantikan dan sangat menentukan keberhasilan produksi hortikultura (60 persen); (c) dominasi perusahaan asing (90 persen) dalam industri perbenihan hortikultura di Indonesia; (d) pro-kontra terkait dengan kebijakan divestasi PMA ini, di mana kelompok yang kontra menilai akan kontra produktif dan akan mendorong potensi impor benih hortikultura yang dapat mencapai nilai Rp70 triliun; dan (e) putusan MK yang menolak uji materi terkait divestasi tersebut, sehingga akan berdampak terhadap pengembangan sektor hulu-hilir perbenihan nasional, dan keberlanjutan pengembangan sektor hortikultura ke depan.

Keberhasilan pengembangan sektor strategis utama akan sangat tergantung pada kinerja sektor strategis pendukungnya yang akan memberikan fasilitasi dan sebagai faktor pendorong pengembangan ekonomi nasional. Faktor yang melatarbelakangi pentingnya reformulasi sektor keuangan dan perbankan dalam menghadapi tantangan globalisasi di antaranya adalah ketidakpastian keuangan global, perlambatan perekonomian global, dan relatif masih rendahnya harga minyak dunia. Tantangannya bagi Indonesia adalah terus berupaya memantapkan pertumbuhan sektor ekonomi domestik dan meningkatkan daya saingnya di pasar domestik dan ekspor melalui peningkatan efisiensi dan konektivitas dengan pemantapan pengembangan infrastruktur dan manajemen pembangunan nasional. Sektor strategis pendukung berikutnya adalah ketersediaan dan akses energi listrik yang berperan penting dalam mendorong investasi sektor riil dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan yang besar terkait penyediaan energi listrik, baik secara geografis dan jumlah penduduk yang besar, dalam kondisi keterbatasan energi listrik. Penyediaan energi listrik merupakan permasalahan kompleks, sehingga pemerintah memberikan perhatian dan penanganan secara khusus dan berkelanjutan. Pemerintahan Joko Widodo menargetkan penambahan energi listrik sebesar 35.000 megawatt pada akhir tahun 2019.

Reformasi kebijakan pendukung pembangunan lainnya yang patut mendapatkan perhatian adalah pengelolaan aset dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. BUMN dengan nilai aset yang besar dan sebagai *agent of development* mempunyai potensi yang sangat besar dalam mendorong sektor ekonomi riil jika dikelola secara optimal. BUMN dihadapkan pada permasalahan

overinvestment dan pemborosan yang diindikasikan oleh tingkat profitabilitas dan nilai *return on asset* (ROA) yang sangat kecil. Pada kondisi pengelolaan aset yang kurang optimal, pemerintah justru memberikan stimulus ekonomi khususnya terkait dengan pelayanan publik melalui PMN pada BUMN, yang pada akhirnya berdampak kurang kondusif pada pengembangan semangat dan tata kelola yang profesional. Dua aspek penting lainnya sebagai faktor pendukung strategis pembangunan ekonomi nasional adalah peran ekonomi digital dan kebijakan liberalisasi perdagangan. Ekonomi digital memiliki tiga komponen utamanya yaitu infrastruktur pendukung (*hardware, software, telekomunikasi, dan jaringannya*), *e-business*, dan *e-commerce* yang dalam praktiknya telah merambah banyak sektor perekonomian seperti perdagangan, transportasi, keuangan, dan kesehatan, di samping bidang TIK (teknologi informasi dan komunikasi). Menyadari akan pentingnya ekonomi digital, maka pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Disadari bahwa dibutuhkan reformasi kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan pengembangan ekonomi digital yang mencakup aspek permodalan, perpajakan, perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur, pengiriman logistik, dan sumber daya manusia.

Di era globalisasi, setiap negara dituntut menerapkan keterbukaan ekonomi, yaitu keterbukaan perdagangan maupun keterbukaan keuangan, dengan sasaran akselerasi kelancaran arus mobilitas barang dan modal antarnegara dan kawasan. Indonesia telah meratifikasi sejumlah kesepakatan perdagangan internasional baik kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, sehingga harus menerapkan sejumlah kebijakan seperti penurunan hambatan tarif dan penghapusan hambatan nontarif seperti kuota impor. Dalam konteks kedaulatan dan kemandirian

ekonomi nasional perlu dilakukan adaptasi dan reformasi kebijakan liberalisasi sehingga tetap sejalan dengan upaya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta, September 2016

Editor

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Prolog	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xvi

BAGIAN PERTAMA

KEBIJAKAN SEKTOR STRATEGIS UTAMA EKONOMI NASIONAL .. 3

PARADIGMA DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI.....	3
--	---

Juli Panglima Saragih

I. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Tujuan Penulisan	5
II. Dinamika dan Regulasi Pengelolaan Migas.....	5
2.1. Dinamika Pengelolaan Migas	5
2.2. Regulasi Pengelolaan Migas.....	14
III. Kompleksitas Pengelolaan Migas	17
3.1. Persoalan Kelembagaan	17
3.2. Persoalan Volatilitas Harga	20
3.3. Gas Bumi untuk Industri dan Energi.....	21
3.4. Penurunan Produksi dan Ancaman Ketahanan Energi.....	25
IV. Paradigma Baru dan Tantangan ke Depan	31
V. Penutup	39
Daftar Pustaka.....	41

PERAN <i>BRANDING WONDERFUL INDONESIA</i> DALAM PEMASARAN PARIWISATA INDONESIA: HARMONISASI PROMOSI DAN EKSPEKTASI WISATAWAN	45
--	----

Yuni Sudarwati

I. Pendahuluan	46
II. <i>Brand</i> dan Pemasaran Pariwisata.....	48
2.1. Brand Pariwisata	48
2.2. Pemasaran Pariwisata.....	53
III. Pemasaran Pariwisata dan <i>Branding Wonderful Indonesia</i>	55
3.1. Permasalahan Pemasaran Pariwisata Indonesia	55
3.2. Peran <i>Branding Wonderful Indonesia</i>	57
(1) Karakteristik dan Eksistensi <i>Branding Wonderful Indonesia</i>	57
(2) Promosi <i>Wonderful Indonesia</i>	61
(3) Harmonisasi Promosi dan Ekspektasi Wisatawan.....	63
IV. Penutup	66
Daftar Pustaka.....	69

PENINGKATAN PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PRODUK UMKM DI INDONESIA.....	73
--	----

Sony Hendra Permana

I. Pendahuluan	74
II. Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Informasi	79
2.1. Perkembangan Internet	79
2.2. Memanfaatkan Perkembangan E-commerce.....	82
III. Upaya Pemerintah dalam Mendukung Pemasaran UMKM.....	86
3.1. Promosi pada <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	86
3.2. Konektivitas Jaringan dan Kualitas Kecepatan Akses Internet.....	88
3.3. Optimalisasi Fungsi Pos Indonesia.....	91
IV. Penutup	94
Daftar Pustaka.....	97

KOPERASI DALAM MENGHADAPI PEREKONOMIAN GLOBAL: REORIENTASI ARAH, ELEMEN, DAN KEANGGOTAAN.....	101
--	-----

Mandala Harefa

I. Pendahuluan	102
II. Azaz Koperasi dan Manajemen Modern.....	106
III. Reformulasi Arah Perubahan Koperasi	111
IV. Perubahan Pola Pikir dan Keanggotaan Koperasi	113
4.1. Perubahan Pola Pikir dan Elemen Koperasi.....	116
4.2. Reorientasi Keanggotaan Koperasi	119
V. Penutup	122
Daftar Pustaka.....	124

KEBIJAKAN DIVESTASI PMA PERBENIHAN HORTIKULTURA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SISTEM AGRIBISNIS	127
--	-----

Iwan Hermawan

I. Pendahuluan	128
II. Sistem Agribisnis dan Tinjauan Yuridis Perbenihan Hortikultura.....	133
2.1. Sistem Agribisnis Perbenihan Hortikultura.....	133
2.2. Tinjauan Yuridis Perbenihan Hortikultura	137
III. Dampak Kebijakan Divestasi PMA terhadap Hortikultura	140
IV. Perspektif Kebijakan Divestasi PMA Perbenihan Hortikultura	146
4.1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hortikultura.....	147
4.2. Pemuliaan dan Pelepasan Varietas.....	150
4.3. Produksi Benih Hortikultura.....	154
4.4. Pemasaran Benih Hortikultura	157
4.5. Kelembagaan dan Jaringan Informasi	160
V. Penutup	162
Daftar Pustaka.....	163

BAGIAN KEDUA KEBIJAKAN SEKTOR STRATEGIS PENDUKUNG EKONOMI NASIONAL	173
---	------------

REFORMULASI KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI	175
--	-----

Sulasi Rongiyati

I. Pendahuluan	176
II. Kebijakan Sektor Keuangan dan Perbankan	178
2.1. Kebijakan Sektor Keuangan	178
2.2. Kebijakan Sektor Perbankan	183
III. Reformulasi Kebijakan Keuangan dan Perbankan	185
3.1. Legislasi Sektor Keuangan dan Perbankan	185
(1) Undang-Undang PPKSK.....	185
(2) Undang-Undang Pengampunan Pajak	188
(3) Rancangan Undang-Undang Bidang Perbankan.....	190
3.2. Paket Kebijakan Pemerintah	196
IV. Penutup	202
Daftar Pustaka.....	204

KEBIJAKAN PENYEDIAAN ENERGI LISTRIK DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN INVESTASI	207
--	-----

Achmad Sani Alhusain

I. Pendahuluan	208
II. Prasyarat Keharusan Energi Listrik dan Optimalisasi Pengembangan Investasi	212
2.1. Prasyarat Keharusan Energi Listrik	212
2.2. Optimalisasi Pengembangan Investasi	213
III. Kondisi <i>Existing</i> Energi Listrik Indonesia.....	218
IV. Dinamika Kebijakan Penyediaan Energi Listrik	224
4.1. Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono	225
4.2. Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo.....	229
V. Penutup	234
Daftar Pustaka.....	236

PENGELOLAAN ASET DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA BUMN:
KONDISI *EXISTING* DAN REFORMASI KEBIJAKAN239

Rafika Sari

I. Pendahuluan	240
II. Kondisi dan Permasalahan Pengelolaan Aset BUMN.....	243
2.1. Tingkat Profitabilitas BUMN	243
2.2. Permasalahan Pengelolaan Aset BUMN	254
III. Penyertaan Modal Negara kepada BUMN	259
IV. Perspektif Pengelolaan Aset dan PMN.....	267
4.1. Kinerja dan Mekanisme Reward and Punishment	270
4.2. Kebijakan Optimalisasi Aset.....	273
V. Penutup	273
Daftar Pustaka.....	275

KINERJA DAN STRATEGI PENINGKATAN PERAN EKONOMI
DIGITAL DALAM Mendukung pertumbuhan dan
Pemerataan ekonomi nasional.....279

Edmira Rivani

I. Pendahuluan	280
II. Perkembangan Ekonomi Digital.....	282
III. Strategi Peningkatan Peran Ekonomi Digital	286
3.1. Pengembangan Agenda dan <i>Road Map</i> TIK Nasional.....	286
3.2. Kerja sama Industri TIK dalam Pengembangan Infrastruktur	288
3.3. Pengurangan Kesenjangan Digital TIK antarWilayah.....	293
3.4. Penguatan Peraturan dan Kerangka Kelembagaan.....	294
3.5. Penggunaan TIK dalam Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	296

3.6. Peningkatan Potensi dan Kapasitas SDM	297
3.7. Penggunaan TIK untuk Mendukung Sektor Ekonomi Prioritas.....	298
IV. Penutup	298
Daftar Pustaka.....	300

KEBIJAKAN LIBERALISASI PERDAGANGAN: DAMPAK DAN PERSPEKTIFNYA DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL.....	303
---	-----

Eka Budiyantri

I. Pendahuluan	304
II. Kebijakan Liberalisasi Perdagangan	307
III. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Perekonomian Nasional.....	314
3.1. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Sektor Primer (Pertanian)	314
3.2. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Sektor Sekunder (Industri Manufaktur)	316
3.3. Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Sektor Tersier (Jasa)	318
IV. Perspektif Kebijakan dalam Eliminasi Dampak Liberalisasi Perdagangan	321
4.1. Eliminasi Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Sektor Primer (Pertanian)	321
4.2. Eliminasi Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Sektor Sekunder (Industri Manufaktur)	321
4.3. Eliminasi Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Sektor Tersier (Jasa)	322
V. Penutup	323
Daftar Pustaka.....	325
Epilog	321
Biografi Penulis.....	343
Biografi Editor.....	349
Indeks	339

Daftar Tabel

PARADIGMA DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Juli Panglima Saragih

Tabel 1. <i>Monitoring Volume Lifting Gas Bumi Nasional, Per Desember 2015</i>	24
Tabel 2. <i>Monitoring Volume Lifting Minyak Bumi Nasional, Per Juni 2016</i>	28
Tabel 3. Kapasitas Kilang Minyak Mentah PT. Pertamina (Persero)	32
Tabel 4. Peta Jalan Infrastruktur Gas Bumi di Indonesia 2016-2030.....	33

KOPERASI DALAM MENGHADAPI PEREKONOMIAN GLOBAL: REORIENTASI ARAH, ELEMEN, DAN KEANGGOTAAN

Mandala Harefa

Tabel 1. Rekapitulasi Indikator Koperasi Indonesia, Tahun 2009-2014.....	105
--	-----

KEBIJAKAN DIVESTASI PMA PERBENIHAN HORTIKULTURA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SISTEM AGRIBISNIS

Iwan Hermawan

Tabel 1. Pendapat tentang Kebijakan Divestasi PMA Perbenihan Hortikultura di Indonesia	129
Tabel 2. Perkembangan Ketersediaan Benih Bermutu di Indonesia Tahun 2010-2014	156

REFORMULASI KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN DAN PERBANKAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI

Sulasi Rongiyati

Tabel 1. Langkah Strategis dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Global, September 2015 – April 2016	196
--	-----

KEBIJAKAN PENYEDIAAN ENERGI LISTRIK
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN INVESTASI
Achmad Sani Alhusain

Tabel 1. Delapan Langkah Percepatan Pembangunan Proyek 35.000 megawatt di Indonesia	233
---	-----

PENGELOLAAN ASET DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA BUMN:
KONDISI *EXISTING* DAN REFORMASI KEBIJAKAN
Rafika Sari

Tabel 1. Aset, Laba, dan ROA BUMN Menurut Sektor di Indonesia Tahun 2014.....	245
Tabel 2. Komparasi Aset, Laba Bersih, dan ROA PT. Pertamina (Persero) dan Petronas, Tahun 2014.....	247
Tabel 3. PMN dan Jumlah BUMN Penerima PMN Menurut Jenis Program di Indonesia, Tahun 2015 dan 2016.....	263
Tabel 4. Pemetaan BUMN Menurut Fungsi di Indonesia	269

KINERJA DAN STRATEGI PENINGKATAN PERAN EKONOMI DIGITAL DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI NASIONAL
Edmira Rivani

Tabel 1. Indikator Infrastruktur Utama dan Konten Digital.....	287
--	-----

KEBIJAKAN LIBERALISASI PERDAGANGAN:
DAMPAK DAN PERSPEKTIFNYA DALAM MENDUKUNG PEREKONOMIAN NASIONAL
Eka Budiyantri

Tabel 1. Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia Per Sektor Ekonomi Tahun 2012-2015 (dalam juta USD)	309
--	-----

Daftar Gambar

PARADIGMA DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI

Juli Panglima Saragih

Gambar 1. Produksi (<i>Lifting</i>) Minyak Mentah Indonesia, 2005-2015 (Barel per Hari).....	7
Gambar 2. Penerimaan Negara dari Migas, 2005 - 2015 (Rp. Miliar).....	10
Gambar 3. Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia, Tahun 2013	24
Gambar 4. Peta Kilang LPG dan LNG di Indonesia.....	25

PENINGKATAN PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARANPRODUK UMKM DI INDONESIA

Sony Hendra Permana

Gambar 1. Data Pengguna Internet Menurut Usia Tahun 2014	80
Gambar 2. Jumlah Kelas Menengah di Indonesia Tahun 2012 dan Prediksi Tahun 2020	83
Gambar 3. Jumlah Pengguna Internet Berdasarkan Wilayah di Indonesia Tahun 2014.....	89
Gambar 4. Indikator Infrastruktur Utama dan Konten Digital Tahun 2014	90

KOPERASI DALAM MENGHADAPI PEREKONOMIAN GLOBAL:
REORIENTASI ARAH, ELEMEN, DAN KEANGGOTAAN

Mandala Harefa

- Gambar 1. Perkembangan Kinerja Usaha Koperasi di Indonesia
Tahun 2004-2014112
- Gambar 2. Struktur Koperasi Aktif Berdasarkan Jenis Koperasi
di Indonesia, Tahun 2013113

KEBIJAKAN DIVESTASI PMA PERBENIHAN HORTIKULTURA
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SISTEM AGRIBISNIS

Iwan Hermawan

- Gambar 1. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri
Subsektor Hortikultura di Indonesia
Tahun 2006-2014..... 141
- Gambar 2. Perkembangan Penanaman Modal Asing Subsektor
Hortikultura di Indonesia Tahun 2006-2014..... 142
- Gambar 3. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas
Hortikultura di Indonesia Tahun 2002-2014..... 145
- Gambar 4. Pangsa Pasar Perusahaan Perbenihan
Hortikultura di Indonesia Tahun 2012
(Pasca Kebijakan Divestasi PMA) 159

KEBIJAKAN PENYEDIAAN ENERGI LISTRIK DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN INVESTASI

Achmad Sani Alhusain

- Gambar 1. Realisasi dan Target Rasio Elektrifikasi PLN
di Indonesia, 2010 – 2019219

PENGELOLAAN ASET DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA BUMN:
KONDISI *EXISTING* DAN REFORMASI KEBIJAKAN

Rafika Sari

Gambar 1. Perkembangan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN di Indonesia, Tahun 2010-2016.....	260
--	-----

KINERJA DAN STRATEGI PENINGKATAN PERAN EKONOMI
DIGITAL DALAM Mendukung PERTUMBUHAN
DAN PEMERATAAN EKONOMI NASIONAL

Edmira Rivani

Gambar 1. Perkembangan Pangsa PDB Internet di Negara G20.....	282
Gambar 2. Indeks Penggunaan ICT di 9 Negara, Tahun 2015.....	283
Gambar 3. Produktivitas Sektor IT Beberapa Negara vs Produktivitas Total, Tahun 2014.....	284

KEBIJAKAN LIBERALISASI PERDAGANGAN: DAMPAK DAN
PERSPEKTIFNYA DALAM Mendukung PEREKONOMIAN NASIONAL

Eka Budiyanti

Gambar 1. Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia Tahun 2011-2015 (dalam Miliar USD).....	308
Gambar 2. Pertumbuhan Keterbukaan Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2001-2015 (dalam Persen).....	310
Gambar 3. Peranan Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian Nasional.....	312

BAGIAN PERTAMA:
KEBIJAKAN SEKTOR STRATEGIS UTAMA
EKONOMI NASIONAL

Epilog

Buku dengan judul “Reformulasi Kebijakan Sektor Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Globalisasi” mencakup dua dimensi utama, yaitu: (a) Kebijakan sektor strategis utama ekonomi nasional; dan (b) Kebijakan sektor strategis pendukung ekonomi nasional. Penguatan dan reformulasi kebijakan kedua sektor strategis ini bersifat komplementer, di mana kebijakan strategis pendukung merupakan katalisator dan pendorong keberhasilan pencapaian sektor strategis utama yang merupakan sektor ekonomi riil nasional. Dalam pengelolaan migas ke depan, menurut **Juli P. Saragih** perlu dilakukan reorientasi paradigma dan tata kelola agar tetap sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 33. Dalam perspektif kedaulatan dan kemandirian energi, harus dikedepankan penggunaan migas sebagai sumberdaya pembangunan dan sumber energi untuk mendorong kemajuan di sektor industri, energi listrik, transportasi, dan sektor ekonomi rumah tangga. Jadi dibutuhkan reorientasi pola pikir, di mana migas tidak dapat dipandang secara eksklusif sebagai komoditas dengan orientasi ekspor untuk perolehan devisa negara. Peran dan dominasi negara harus semakin besar, namun dalam kondisi keterbatasan sumber daya investasi, negara masih membutuhkan investasi asing dan teknologi tinggi untuk pengembangan sektor hulu migas dengan prinsip saling menguntungkan.

Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah telah meluncurkan *branding Wonderful Indonesia* dengan target kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebesar 20 juta wisatawan manca negara. Menurut **Yuni Sudarwati** permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian adalah internalisasi semangat dan nilai *Wonderful Indonesia* di kalangan pengelola pariwisata

dan masyarakat luas. Keberhasilan *Wonderful Indonesia* menaikkan *brand value* Indonesia, mendongkrak *country image*, dan menaikkan *trust*, harus dikomplemen dengan kemampuan untuk mengatasi kendala dan permasalahan pengembangan pariwisata di dalam negeri. Rendahnya daya saing pariwisata Indonesia di antaranya disebabkan oleh kendala ketersediaan, kemudahan, biaya tinggi transportasi dan akomodasi, kepedulian terhadap kebersihan, konservasi lingkungan, di samping permasalahan terkait keselamatan dan keamanan wisatawan. Reformulasi kebijakan pemasaran pariwisata Indonesia harus diarahkan pada peningkatan daya saing tersebut, sehingga bukan saja target peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat diraih tetapi lama tinggalnya juga akan meningkat. Dalam perspektif internalisasi strategi dan keberhasilan pemasaran pariwisata ini perlu juga digugah dan difasilitasi kesadaran berwisata di dalam negeri bagi masyarakat Indonesia.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah sokoguru ekonomi masyarakat dengan populasi tinggi dan sebagian besar bersifat informal, dengan sejumlah permasalahan khususnya di bidang pemasaran produk yang dihasilkan. Analisis yang dilakukan **Sony Hendra Permana** menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dapat menjadi solusi bagi permasalahan pemasaran dan distribusi produk yang dihadapi UMKM. Perkembangan *internet* dan *e-commerce* melalui situs belanja *online* berpotensi untuk memperluas jangkauan dan diversifikasi pemasaran produk UMKM, baik untuk tujuan pemasaran dalam negeri maupun ekspor. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan, misalnya pemerintah daerah dapat menampilkan produk-produk UMKM pada *website* resmi Pemda, sehingga dapat memberikan jaminan bahwa produk tersebut memiliki keaslian dan berkualitas baik. Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur yang mampu mendukung kemajuan teknologi TIK,

memperluas jangkauan, dan kecepatan akses internet di seluruh Indonesia. Di samping itu, diperlukan upaya optimalisasi fungsi Pos Indonesia sebagai perusahaan jasa pengiriman yang handal dan aman untuk mendukung kegiatan pemasaran UMKM.

Pengembangan koperasi dan UMKM memiliki keterkaitan yang kuat. Koperasi dapat berfungsi sebagai wadah kelembagaan bagi pengembangan UMKM yang sebagian besar dengan skala menengah ke bawah dan bersifat informal. Analisis yang dilakukan **Mandala Harefa** menunjukkan bahwa dalam usianya yang telah melebihi setengah abad, koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional dan juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi di tingkat akar rumput, belum berperan seperti yang diharapkan khususnya terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif globalisasi, pengembangan koperasi melalui pemantapan program kemitraan, perlu diperkuat dengan internalisasi jiwa kewirausahaan dan penguatan aspek kelembagaan (pasar *input*, usaha produktif, dan pasar *output*) sehingga mampu bersaing dengan entitas bisnis lainnya.

Pengembangan industri benih hortikultura memegang peranan penting dalam peningkatan produksi komoditas hortikultura, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor. Polemik kebijakan divestasi PMA pada industri perbenihan hortikultura didasarkan atas kekhawatiran ketidaksiapan industri benih lokal, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keberlanjutan pengembangan dan produksi hortikultura nasional. Menurut **Iwan Hermawan**, pengembangan industri benih hortikultura perlu dilihat secara integratif hulu-hilir, bukan bersifat parsial yang hanya melihat dari sisi hilir saja, yaitu eksistensi produsen benih lokal untuk melakukan kegiatan produksi dan ketersediaan benih hortikultura. Sementara itu, kemampuan produsen benih lokal masih menghadapi

permasalahan serius terkait dengan pengelolaan SDG, pemuliaan tanaman, dan kelembagaan serta jaringan informasi terkait pengembangan industri benih di lapangan. Dalam perspektif ke depan, kebijakan pengembangan dan penguatan produsen benih lokal perlu diawali dengan pemantapan sub-sistem hulu agribisnis perbenihan hortikultura, dalam rangka mewujudkan industri benih yang berdaya saing dan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan hortikultura nasional.

Keberhasilan pembangunan sektor strategis utama tidak terlepas dari pemantapan dan penguatan kebijakan terkait dengan sektor strategis pendukung sebagai prasyarat keharusan dalam pembangunan ekonomi nasional. **Sulasi Rongiyati** menyatakan bahwa hanya bangsa yang memiliki keunggulan dalam pengembangan SDM, teknologi *frontier*, infrastruktur, budaya kerja dan korporasi yang handal, serta mampu menampilkannya dalam bentuk keunggulan komparatif dan kompetitif yang akan memenangkan pertarungan dalam era globalisasi. Dinyatakan bahwa Indonesia telah mengantisipasinya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sektor keuangan dan perbankan serta kebijakan internal paket kebijakan ekonomi secara bertahap. Dari sisi regulasi, sedikitnya dua undang-undang telah berhasil dibentuk yaitu Undang-Undang PPKSK dan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Beberapa RUU perbankan sedang disiapkan penyusunan dan pembahasannya antara lain RUU BI, RUU OJK, dan RUU Perbankan. Sejak September 2015, pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I-XII secara bertahap yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan strategis pendukung berikutnya adalah penyediaan energi listrik dalam mendukung peningkatan investasi. **Achmad Sani Alhusain** menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, di mana sampai tahun

2015 rasio elektrifikasi listrik sudah mencapai 88,3 persen dan akan terus ditingkatkan menjadi 97,3 persen (2019) dan akhirnya 100 persen pada tahun 2020, melalui program pembangunan listrik 35.000 megawatt. Program pembangunan listrik 35.000 megawatt ini bukanlah program yang mudah untuk direalisasikan, namun dengan sejumlah kebijakan pendukung diharapkan dapat diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia dan mendorong peningkatan investasi. Dinyatakan telah ditetapkan delapan langkah percepatan pembangunan proyek 35.000 megawatt tersebut, serta telah diidentifikasi permasalahan danantisipasi solusinya. Delapan langkah percepatan tersebut mencakup penyediaan lahan, negosiasi harga, proses pengadaan dari IPP, proses perizinan, kinerja pengembang dan kontraktor, manajemen proyek, koordinasi lintas sektor, serta RTRW dan percepatan pembangunan.

Penyertaan modal Negara pada BUMN memunculkan kontroversi terkait dengan belum optimalnya alokasi sumberdaya yang dikuasai oleh BUMN, sehingga memunculkan disefisiensi dan rendahnya profitabilitas. Hasil analisis **Rafika Sari** menunjukkan bahwa rendahnya profitabilitas BUMN disebabkan oleh permasalahan *overinvestment* dan rendahnya utilisasi aset, sehingga dibutuhkan perencanaan tata kelola dengan mengedepankan prinsip optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan sasaran maksimisasi keuntungan dan pencapaian indikator kinerja lainnya. Dalam konteks ini dibutuhkan inventarisasi dan pemetaan aset BUMN (saat ini diperkirakan mencapai Rp5.400 triliun) dan juga pemetaan tupoksinya apakah murni *profit oriented*, BUMN perintis, atau murni melakukan pelayanan publik. Berdasarkan data ini dapat dilakukan analisis optimalisasi aset secara agregat dan internal BUMN dengan sasaran maksimisasi tujuan BUMN (tunggal atau ganda) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan ini dapat dipakai sebagai basis oleh pemerintah

untuk memberikan *reward and punishment*, dan bersama-sama dengan DPR dapat mencegah kehilangan aset BUMN, baik melalui pelepasan maupun pemindahtanganan aset.

Bahasan terkait dengan peran ekonomi digital dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional dilakukan oleh **Edmira Rivani**. Dinyatakan bahwa ekonomi digital memberikan peran dan dampak signifikan dalam peningkatan efisiensi, diversifikasi, dan kinerja sektor perdagangan dan sektor pelayanan jasa lainnya. Pemerintah patut memberikan dukungan kebijakan terkait dengan regulasi, pengembangan infrastruktur, dan mengeliminasi faktor penghambat pengembangan ekonomi digital. Ekonomi digital berperan positif dalam meningkatkan pelayanan pemerintah, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, dan memberikan keterbukaan dan akses informasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing negara dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ditegaskan bahwa masa depan Indonesia akan tergantung pada inovasi teknologi yang menghubungkan, memberi informasi, mendidik, dan mendukung kehidupan masyarakat serta mengangkat kinerja usaha lokal.

Dalam perspektif membangun kedaulatan dan kemandirian perekonomian nasional, **Eka Budiyantri** lebih menekankan pada prinsip kehati-hatian dalam meratifikasi dan implementasi liberalisasi perdagangan nasional. Pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat kesiapan industri dan memberikan perlindungan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan meningkatkan daya saingnya baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Indonesia sebagai negara besar, dengan populasi penduduk besar dan potensi pasar domestik tinggi, misalnya dalam membangun sektor pertanian harus mengedepankan pemanfaatan sumber daya pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kebijakan impor pangan dapat dilakukan bila produksi dalam negeri tidak mencukupi (*import*

at the last resort), sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Indonesia perlu melakukan pentahapan dalam penerapan liberalisasi perdagangan (misalnya dalam penurunan tarif impor) disesuaikan dengan tingkat daya saing industri, sehingga tidak terjadi deindustrialisasi dalam pengembangan komoditas dan produk di dalam negeri. Pada setiap kerja sama perdagangan (bilateral, regional, dan global) agar dipastikan bahwa Indonesia mendapatkan manfaat dan dampak positif bagi pengembangan dan keberlanjutan industri nasional dalam jangka panjang ke depan.

Jakarta, September 2016

Editor

INDEKS

A

Agribisnis 15, 20, 24, 159, 160, 167,
189, 190, 197, 373
Anggota 135, 151, 367, 368, 371, 373
ASEAN 85, 307, 309, 327, 330, 331, 341,
342, 344, 346, 348, 349, 351,
352, 354, 367, 373
Aset 17, 21, 24, 223, 267, 271, 273, 279,
280, 283, 284, 285, 293, 296,
297, 299, 300, 302, 303, 304,
373

B

Broadband 105, 312, 326, 373
BUMN 4, 10, 11, 17, 21, 22, 24, 31, 53,
54, 101, 162, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304,
361, 362, 368, 373

D

Daya Saing 100, 108, 111, 123, 124,
177, 190, 339, 343, 346, 351,
355, 367, 369, 373
Digital 17, 18, 22, 23, 25, 116, 307, 313,
319, 327, 373
Divestasi 15, 20, 24, 154, 155, 156, 185,
197, 295, 373

E

E-commerce 14, 108, 111, 373
Ekonomi 2, 3, 11, 17, 18, 21, 22, 25, 107,
109, 123, 133, 135, 150, 151,
158, 181, 184, 191, 192, 209,
222, 223, 225, 227, 228, 229,

231, 237, 240, 241, 244, 257,
262, 268, 279, 288, 298, 301,
302, 304, 306, 307, 308, 310,
312, 322, 324, 326, 327, 330,
331, 332, 335, 336, 341, 342,
351, 352, 353, 354, 357, 360,
362, 365, 366, 367, 368, 369,
370, 371, 373, 374

Eksplorasi 45, 67, 373

Ekspor 22, 25, 159, 195, 333, 334, 335,
337, 340, 341, 343, 352, 355,
373

Ekspor migas 373

G

Gerakan 373

Globalisasi 2, 3, 16, 21, 22, 228, 347,
353, 357, 373

H

Hortikultura 15, 20, 24, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 163, 164, 165,
167, 168, 169, 170, 171, 173,
175, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 373

I

Impor 22, 25, 60, 171, 180, 195, 333,
334, 335, 340, 352, 355, 373

Impor migas 373

Indeks 19, 25, 309, 373

Industri 9, 13, 17, 18, 35, 47, 48, 63, 72,
96, 105, 155, 156, 162, 167, 169,
177, 181, 184, 185, 186, 190,
191, 192, 195, 197, 225, 271,
273, 274, 276, 289, 292,

- 295, 314, 323, 324, 330, 335, 342, 344, 347, 353, 354, 355, 370, 373
- Infrastruktur 17, 20, 22, 23, 58, 59, 79, 116, 223, 243, 245, 258, 263, 264, 290, 312, 313, 314, 373
- Inovasi 179, 189, 210, 373
- Internet 14, 23, 25, 105, 106, 107, 114, 115, 123, 125, 308, 373
- Investasi 16, 17, 21, 24, 155, 166, 167, 184, 190, 191, 196, 223, 224, 239, 240, 241, 263, 373
- J**
- Jaringan 14, 16, 60, 114, 163, 186, 235, 373
- K**
- Kebijakan 2, 3, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 39, 50, 66, 102, 126, 133, 144, 150, 154, 155, 156, 158, 167, 176, 181, 184, 185, 190, 191, 192, 195, 202, 204, 209, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231, 241, 250, 251, 252, 255, 257, 260, 262, 263, 268, 278, 284, 295, 296, 298, 301, 303, 304, 308, 315, 326, 331, 333, 340, 341, 342, 347, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 357, 360, 362, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373
- Koperasi 15, 20, 23, 24, 100, 102, 103, 104, 105, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 145, 150, 151, 359, 370, 373
- Kredit 101, 102, 123, 135, 221, 223, 224, 369, 374
- L**
- Liberalisasi 18, 22, 25, 330, 333, 335, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 374
- Listrik 16, 17, 21, 24, 52, 68, 69, 225, 238, 245, 246, 252, 256, 257, 258, 262, 263, 264, 266, 275, 374
- M**
- Mahkamah Konstitusi 41, 42, 43, 156, 374
- Manajemen 15, 75, 95, 135, 150, 151, 239, 259, 263, 267, 302, 326, 331, 353, 354, 365, 367, 370, 374
- Migas 374
- Mobile* 374
- Modal 17, 21, 24, 135, 151, 164, 167, 168, 190, 193, 240, 262, 267, 268, 285, 286, 290, 302, 303, 374
- O**
- Online* 96, 310, 374
- Organisasi 68, 75, 95, 133, 150, 161, 190, 374
- Otoritas Jasa Keuangan 209, 211, 212, 213, 216, 226, 231, 308, 374, 375
- P**
- Paradigma 13, 20, 23, 63, 65, 69, 371, 374
- Pemasaran 14, 15, 23, 79, 81, 82, 85, 97, 104, 134, 183, 374
- Pembangunan 21, 46, 52, 58, 67, 68, 109, 123, 174, 176, 189, 203, 234, 236, 237, 238, 241, 242,

- 245, 256, 258, 259, 262, 263, 264, 268,
289, 298, 304, 341, 343, 351,
354, 365, 366, 368, 369, 374
- Pemerintah 8, 14, 16, 32, 36, 37, 42,
53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
90, 93, 102, 112, 113, 114, 120,
126, 155, 156, 164, 170, 173,
182, 197, 205, 207, 209, 211,
213, 214, 222, 223, 227, 229,
237, 239, 250, 255, 256, 257,
260, 261, 263, 268, 279, 281,
283, 284, 288, 298, 299, 302,
303, 304, 307, 308, 312, 314,
315, 318, 320, 322, 324, 327,
340, 342, 347, 349, 354, 358,
362, 374
- Pengelola 42, 102, 297, 300, 374
- Pengelolaan 13, 15, 17, 20, 21, 23, 24,
31, 40, 63, 65, 68, 69, 161, 173,
174, 176, 195, 273, 280, 301,
369, 370, 374
- Penyertaan Modal Negara 17, 21, 24,
267, 286, 290, 303, 374
- Perbenihan 15, 20, 24, 154, 155, 159,
160, 162, 163, 169, 180, 185,
189, 190, 191, 196, 374
- Perdagangan 18, 22, 25, 225, 226, 271,
272, 295, 330, 331, 332, 333,
335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 349, 351, 352, 353,
354, 355, 367, 374
- Pertanian 18, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 161, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 171, 172, 173,
175, 176, 177, 178, 179, 181,
182, 183, 184, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 271,
335, 340, 341, 342, 347, 351,
352, 353, 354, 365, 366, 368,
371, 372, 374
- Pertumbuhan Ekonomi 330, 331, 332,
353, 354, 374
- Petroleum fund* 374
- PMA 3, 4, 7, 9, 15, 20, 24, 153, 154, 155,
166, 169, 172, 176, 177, 178,
181, 183, 184, 185, 186, 188,
241, 359, 374
- PMDN 155, 166, 168, 169, 172, 176,
177, 181, 184, 185, 186, 374
- Pos Indonesia 15, 117, 118, 119, 120,
121, 124, 126, 359, 374
- Production Sharing Contract* 32, 374
- Produksi 13, 15, 23, 24, 33, 45, 49, 51,
54, 55, 67, 69, 134, 156, 158,
162, 165, 166, 171, 180, 189,
193, 367, 374
- Produsen 156, 170, 177, 184, 190, 197,
345, 374
- Profitabilitas 17, 269, 374
- PT. Pertamina 20, 21, 50, 266, 272, 273,
297, 374
- R
- Rasio Elektrifikasi 24, 245, 374
- Reformulasi 2, 3, 15, 16, 21, 22, 357,
358, 374
- ROA 11, 21, 266, 267, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 374
- S
- SDM 8, 18, 53, 102, 103, 120, 143, 161,
177, 228, 323, 360, 374
- Sektor Riil 375
- SHU 137, 375
- Soko guru 375
- Stabilitas sistem keuangan 375

- Strategi 17, 22, 25, 56, 78, 85, 97, 118,
124, 136, 278, 284, 290, 301,
303, 366, 370, 371, 375
- T
- Tarif 375
- Teknologi Informasi 14, 23, 107, 306,
375
- U
- UKM 102, 103, 104, 105, 108, 111, 113,
124, 125, 126, 128, 131, 138,
139, 150, 151, 370, 375
- UMKM 3, 7, 8, 14, 23, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 107, 109, 111,
112, 113, 114, 117, 118, 119,
120, 121, 123, 125, 126, 215,
220, 224, 358, 359, 369, 375
- Unit 58, 59, 64, 187, 259, 369, 375
- Usaha 24, 48, 67, 68, 100, 101, 102, 103,
108, 111, 123, 124, 126, 138,
162, 164, 193, 223, 224, 225,
246, 257, 266, 282, 284, 285,
286, 295, 303, 358, 367, 368,
369, 370, 375
- W
- Website* 2, 14, 69, 96, 112, 124, 151,
194, 231, 264, 303, 327, 354,
375
- Wilayah Kerja 69, 375
- WTO 73, 97, 206, 330, 340, 375

Biografi Penulis

Achmad Sani Alhusain, lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan *Master of Art in Economic Policy* di *Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA*, 2002. Penulis merupakan Peneliti Madya golongan IV/a dengan bidang kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisan yang sudah diterbitkan antara lain berjudul: Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia, dan Upah Minimum: Kebijakan, Permasalahan, dan Solusi. Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisis yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan publik serta memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dalam proses pembentukan Undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran. Email: sani_alhusain@yahoo.com

Edmira Rivani, menyelesaikan studi S1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2) pada Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dilakukan penulis seperti: Kebijakan Sektor Pertanian dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan Dalam Perumahan Rakyat: Studi Implementasi Rancangan Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pembentukan Kawasan Pariwisata Khusus Dalam Rangka Meningkatkan

Kinerja Pariwisata Nasional, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Otonomi Baru, Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah Pasca Kebijakan Baru Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dll. Penulis dapat dihubungi melalui email: edmira.rivani@dpr.go.id atau rif_green@yahoo.com.

Eka Budiyantri, lahir di Jakarta, 22 Januari 1984. Menempuh studi S1 pada jurusan Matematika – Fakultas MIPA, Universitas Padjadjaran pada tahun 2001 dengan kekhususan matematika terapan. Kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006 dengan kekhususan kebijakan moneter dan perbankan. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Beberapa topik jurnal dan buku yang telah ditulis: *time inconsistency* dalam kebijakan moneter, *inflation targeting*, subsidi pajak, pinjaman luar negeri, stabilitas sistem keuangan, krisis Eropa, sektor keuangan, *green banking*, *twin deficit*, bank khusus industri, industri manufaktur, dan investasi. Penulis dapat dihubungi melalui email: eka.budiyanti@gmail.com atau eka.budiyanti@dpr.go.id.

Iwan Hermawan, lahir di Malang tanggal 11 Juni 1978. Pendidikan S1 dengan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian-Universitas Brawijaya diselesaikan pada tahun 2002, setelah itu jenjang pendidikan dilanjutkan ke S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi-Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 2008. Saat ini pendidikan S3 dengan Program Studi Ilmu Ekonomi-Universitas Indonesia sedang dirampungkan. Pekerjaan sebagai peneliti di bagian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI dimulai sejak tahun 2009. Adapun kepakaran yang dikuasai adalah ekonomi terapan dengan kekhususan di bidang ekonomi makro, ekonomi pertanian, dan perdagangan internasional. Beberapa karya tulis ilmiah yang

dihasilkan, antara lain *The Rice Import Determinant and Trade Liberalization in Jokowi Era* (dipresentasikan di 13th *Indonesian Regional Science Association Conference*) tahun 2016, Analisis Daya Saing Rempah Indonesia di Pasar ASEAN: Periode Pra dan Pasca Krisis Ekonomi Global (dimuat pada *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015), dan Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia (dimuat pada *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik P3DI*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014). Surat elektronik dapat dialamatkan ke: iwan.hermawan@dpr.go.id.

Juli Panglima Saragih, dilahirkan di Kota Tebingtinggi Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 1964. Pekerjaan saat ini (sampai 2015), adalah Peneliti Madya Kebijakan Publik di PPPDI SETJEN DPR RI. Pendidikan terakhir adalah Strata 2 Magister Manajemen, Universitas Nusantara, Jakarta 1999. Pendidikan S1 dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung 1988. Penulis juga aktif sebagai Anggota Redaksi Majalah Kajian, Penerbit PPPDI, dan Redaktur Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEKP) penerbit P3DI Setjen DPR RI. Aktif dalam penyusunan dan pembahasan UU, seperti: Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Perindustrian, RUU Migas, dan Undang-Undang Usaha Perasuransian. Aktif melakukan penelitian lapangan ke daerah, baik dalam rangka tugas pokok dan fungsi, serta dalam penyusunan *draft* RUU dan Naskah Akademik. Kemahiran bahasa asing: Bahasa Inggris lisan dan tulisan. Menulis beberapa buku, baik buku bunga rampai maupun buku individu. Kunjungan ke luar negeri dalam rangka dinas: AS, Australia, India, Canada, Philippina, Thailand, dan Vietnam.

Mandala Harefa, adalah peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen

DPR RI sejak tahun 1995, yang merupakan alumnus Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik - Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Penulis pada saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR RI dalam membuat kajian, analisis kebijakan, proses RUU menjadi undang-undang, dan mempersiapkan makalah bagi Ketua dan Anggota DPR RI. Sebagai peneliti telah melakukan berbagai penelitian lapangan dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku yang topiknya berkaitan dengan permasalahan ekonomi publik sesuai dengan fungsi kedewanan antara lain keuangan Negara dan Daerah, ekonomi Regional, dan topik lainnya terkait dengan ekonomi publik yang telah diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR dan Balai Pustaka.

Rafika Sari, menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro (1999) dan pendidikan Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2006). Bekerja sebagai Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI mulai tahun 2009 dengan kepakaran Kebijakan Publik. Tulisan yang sudah dipublikasikan: "Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Daerah Tertinggal di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5(1) Tahun 2014; "Kondisi Ketahanan Pangan dan Sektor Pertanian Indonesia dalam Rangka Kerja Sama Regional Asia dan Eropa", bagian buku Isu-Isu Internasional Kontemporer dalam Diplomasi Parlemen (2015), dan "Sektor Transportasi Laut dan BUMN: Upaya Menekan Inefisiensi Melalui Integrasi Usaha", Bagian Buku Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia (2015). Penulis dapat dihubungi melalui email: rafika.sari@dpr.go.id.

Sony Hendra Permana adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S1

di Universitas Persada Indonesia YAI dan S2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kepakarannya adalah Ekonomi Terapan. Tulisan yang pernah diterbitkan dalam jurnal dan buku antara lain berjudul: “Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia”, “Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Bangsa: Pengembangan di Sektor UMKM”, dan “Persaingan Usaha Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Menyalurkan Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di sony_hendra@yahoo.com.

Sulasi Rongiyati, lahir di Purwokerto, 1 April 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 1991 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Bekerja di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 1998 dengan jabatan saat ini Peneliti Madya, bidang kepakaran Hukum Ekonomi. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: “Perjanjian Penjaminan Kredit antara UMKM dan Lembaga Penjamin Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan”, “Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah” (2015), “Peran Legislasi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah” (2015), dan “Peran Negara dalam Pengelolaan Migas” (2015), “Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga (2014)”; “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Perspektif Otonomi Daerah (2013)”; “Ganti Kerugian Tanah untuk Kepentingan Pembangunan (2013)”; Tinjauan Yuridis terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (2012)”; dan “Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Khusus (2011).

Penelitian individu yang telah dilakukan, antara lain: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama Pasca-Putusan Mk No. 93/X/PUU/2012 (2015), Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik Industri UKM (2014); Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga (2013); dan Prinsip Padiatapa dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (2012). Penelitian Kelompok yang pernah dilakukan antara lain: “Bentuk Penghormatan Dan Pengakuan Negara Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Beserta Hak-Hak Tradisionalnya (2015)”;

Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (2013); dan Eksistensi Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Nasional (2012).

Yuni Sudarwati, lahir di Purwokerto tanggal 6 Juni 1977. Pendidikan S1 dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Gadjah Mada diselesaikan pada tahun 2000, setelah itu jenjang pendidikan dilanjutkan ke S2 pada Program Studi Manajemen, Magister Sains Ilmu Ekonomi-Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2003. Pekerjaan sebagai peneliti di bagian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan-DPR RI dimulai sejak tahun 2009. Adapun kepakaran yang dikuasai adalah bisnis dan manajemen, dengan kekhususan di bidang manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dihasilkan antara lain Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi Asean (KEA) 2015 (dimuat pada *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik P3DI*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014), Strategi Pengembangan Merek Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (dimuat pada *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik P3DI*, Vol. 4, No. 1, Juni 2013), dan Studi Perbandingan Antara Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan Rancangan Undang-Undang Koperasi 2010 (dimuat pada *Widyariset* Vol.15 No.1 April 2012). Surat elektronik dapat dialamatkan ke: yuni.sudarwati@dpr.go.id.

Biografi Editor

Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU adalah Profesor Riset Agroekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta. Ia lahir di Denpasar, Bali, 31 Desember 1951. Gelar *Ph.D. Agricultural Economics* diraih dari Universitas Filipina di Los Banos (UPLB) tahun 1995. Sejak 1979 bekerja sebagai peneliti pada Pusat Penelitian Agro Ekonomi (sekarang Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian/PSEKP) dan jenjang fungsional Ahli Peneliti Utama (APU) diperoleh pada tahun 2001. Orasi pengukuhan sebagai Profesor Riset dilakukan pada 30 Desember 2010 dengan judul orasi: Reorientasi Paradigma dan Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Posisi struktural yang pernah dijabat adalah sebagai Kabid Publikasi dan Kerja sama Penelitian PSEKP (1999-2001) dan Kepala Program R&D UNESCAP-CAPSA (2006-2008). Tugas pengabdian sebagai Anggota TP3-LIPI (Tim Penilai Peneliti Pusat di LIPI) dilakukan dalam perioda 2011-2015. Saat ini, ia adalah Sekretaris Kelompok Kerja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat di Jakarta dan Widyaiswara Luar Biasa di Pusbindiklat LIPI. Pengabdiannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang agroekonomi dan kebijakan pertanian mencakup aspek: (a) Pembimbing dan promotor program doktor di IPB, Unpad, dan UGM; (b) Editor jurnal ilmiah di *Fapet-IPB*, *Faperta Unud*, *BB Riset Sosek Kelautan dan Perikanan*, *PSEKP*, *Puslitbang Tanaman Pangan*, dan *Pustaka Badan Litbang Pertanian*; (c) Editor lebih dari 35 buku dan prosiding di *PSEKP*, *Puslitbang Peternakan*, *Puris Perikanan Budidaya*, *Perhepi Pusat*, *Badan Keahlian DPR-RI*, *LIPI*, *UNESCAP-CAPSA*, *ACIAR*, dan *APEC*. Atas pengabdiannya dalam penelitian dan pengembangan Iptek, pemerintah

menganugrahan penghargaan: (a) Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun, 1998; (b) Ahli Peneliti Utama (APU) Berprestasi dari Menteri Pertanian, 2002; (c) Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun, 2004; dan (d) Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun, 2016.

Reformulasi Kebijakan Sektoral Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Globalisasi



Buku ini mengetengahkan upaya penguatan dan reformulasi kebijakan pada sektor strategis utama dan sektor strategis pendukung ekonomi nasional. Sektor strategis utama yang dipertimbangkan dalam buku ini adalah sektor minyak dan as bumi, sektor pariwisata, sektor UMKM, koperasi, dan industri benih hortikultura. Penguatan dan reformasi kbiak n d at mencakup aspek paradigma dan strategi, dimensi regulasi, tata kelola, penyertaan modal negara, divestasi PMA, dan pengembangan pemasaran serta perdagangan.

Terbagi ke dalam dua bagian: (1) kebijakan sektor strategis utama ekonomi nasional dan (2) kebijakan sektor pendukung ekonomi nasional, buku ini memberikan beberapa model analisis yang menarik. Pengembangan pariwisata nasional, sebagai salah satu sektor ekonomi unggulan, misalnya, dikedepankannya *branding Wonderful Indonesia*, perlu diperhatikan harmonisasi promosi dan ekspektasi wisatawan. Indonesia memiliki kekuatan wisata alam dan budaya yang beragam, namun masih dihadapkan pada kelemahan yang mencakup kebersihan, kealamat dan keamanan berkelanjutan lingkungan hidup, dan infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata. erhasilan p k gem an sektor an s a is k utama akan sangat tergantung pada kinerja sektor b e g i t a yang akan memberikan fasilitas ebagai k t pen or g ngemb n a ek nom n siona F d a r yang melatarbelakangi pentingnya reformulasi sektor keuangan dan publik dalam adapi t n t a n g l i s i d i n t a n a a d a l a e t i d a k r i n g h keuangan global, perlambatan perekonomian global, dan relatif masih rendahnya harga minyak dunia. Tanta rga mya b a g I r d o n e s i a d a l a h t e r u s b e r u p a y a memantapkan pertumbuhan sektor ekonomi domestik dan meningkatkan daya saingnya di pasar d o m e s t i k dan eksp r me h l i p e n i n g k a t a n e f i s i e n s i dan konektivitas dengan pemantapan pengembangan infrastruktur dan manajemen pembangunan nasional.



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
dan PT Balai Pustaka (Persero)



9 7 8 6 0 2 2 8 0 1 0 2 9